



# Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2021



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021. Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu unsur dari pelayanan publik baik pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, maka setiap Unit Pelayanan Publik harus memiliki dan mempedomani standar pelayanan. Standar Pelayanan yang baik harus disusun melalui proses dan mekanisme penyusunan yang baik pula, yaitu melalui Forum Konsultasi Publik, dimana forum tersebut melibatkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan agar pelayanan yang diberikan selalu dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, sehingga Pelayanan Prima dapat tercapai dan kedepannya layanan akan semakin baik pula.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini dapat menjadi jaminan jika pelayanan publik telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang kali ini diselenggarakan dalam bentuk FDG yang melibatkan beberapa instansi termasuk Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai Narasumber kegiatan ini. Adapun tema yang diangkat dalam Forum Konsultasi Publik kali ini adalah “Optimalisasi Pajak Daerah”. Hasil Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang mereka selenggarakan dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah serta menjadi pegangan bagi instansi lain yang berhubungan dengan unit pelayanan ini.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dan semoga hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah sebagai salah satu ujung tombak PAD di daerah ini.

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANAH LAUT

---

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaannya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tanah Laut



**Drs. H. Surya Arifani, M. Si**  
NIP.19650627 199003 1 011

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tujuan dan Manfaat.....	1
I.3. Ruang Lingkup .....	2
I.4. Dasar Hukum .....	2
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP .....	3
II.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	3
II.2. Penyelenggara dan Peserta FKP .....	3
II.3. Metode Pelaksana FKP .....	3
II.4. Susunan Acara FKP .....	3
BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP .....	4
III.1. Identifikasi Masalah .....	4
III.2. Analisis .....	4
III.3. Rencana Aksi.....	5
BAB VI PENUTUP .....	6
LAMPIRAN/DOKUMENTASI.....	7

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa “*Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik*”. Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Pada dasarnya substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan.

Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang di atas serta terselenggaranya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada hari Rabu 15 September 2021, telah melaksanakan *Forum Konsultasi Publik Sektor Pajak Daerah dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD)* oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, H. Ramdani, SH, MH. Forum konsultasi publik ini merupakan salah satu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dan bagaimana mengoptimalkan potensi pajak dalam peningkatan PAD di Kabupaten Tanah Laut.

Acara yang digelar berupa “*Sosialisasi Perpajakan Daerah di Kabupaten Tanah Laut*” ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antar perwakilan instansi terkait. Pemilihan tema ini didasarkan pada pentingnya aspek pelayanan pajak sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah.

## **I.2. Tujuan dan Manfaat**

### **I.2.1. Tujuan**

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021 ini adalah :

- a. Memberikan gambaran permasalahan yang mungkin / sering timbul pada sektor perpajakan, khususnya pajak daerah
- b. Mencari solusi guna meminimalisir berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah
- c. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah guna mendukung peningkatan pelayanan publik khususnya dalam sektor pajak daerah
- d. Menyatukan persepsi antara Badan Pendapatan Daerah, DPM PTSP, SatpolPP dan Damkar, Bagian Hukum Setda Tanah Laut, dan instansi vertikal yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Tanah Laut dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah

### **I.2.2. Manfaat**

Manfaat dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini adalah

- Terciptanya kesepahaman tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan rekomendasi bersama khususnya pada sektor pajak daerah, antara Badan Pendapatan Daerah, DPM PTSP, SatpolPP dan Damkar, Bagian Hukum Setda Tanah Laut serta Kejaksaan Negeri Tanah Laut dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah.
- Tercapainya kesepakatan pembentukan Tim Kepatuhan Pajak dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah.

## **I.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan kali ini adalah seputar kendala yang mungkin dan sering ditemukan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah secara umum dan yang terjadi pada unit pelayanan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## **I.4. Dasar Hukum**

Dasar Hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah sebagai berikut :

- a. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009.
- c. Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
- d. Surat Edaran Bupati Tanah Laut nomor 065/1978/ORG Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

## BAB II

### METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

#### II.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	: Rabu , 15 September 2021
Waktu Pelaksanaan	: 10.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita
Tempat	: Aula Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

#### II.2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara kegiatan Forum Komunikasi Publik ini adalah Bidang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan instansi terkait seperti DPM PTSP Kabupaten Tanah Laut, SatpolPP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut, Bagian Hukum Setda Tanah Laut, Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta intern aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

#### II.3. Metode Pelaksana FKP

Forum Konsultasi Publik Sektor Pajak Daerah dilaksanakan dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Nara Sumber Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tanah Laut, H. Ramdani, SH, MH.

#### II.4. Susunan Acara FKP

##### *a. Pembukaan*

- Pembukaan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs. H. Surya Arifani, M.Si selaku Pemimpin kegiatan Forum Konsultasi Publik. Dalam sambutannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengutarakan berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi oleh unit pelayanan pada instansi ini dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

##### *b. Paparan seputar permasalahan pajak daerah*

- Paparan disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, H. Ramdani, SH, MH selaku narasumber dalam kegiatan FKP ini. Dalam paparannya, Kepala

Kejaksaan Negeri Tanah Laut menyampaikan beberapa kasus / masalah yang sering terjadi dan menjadi penyebab terhambatnya optimalisasi pemungutan pajak.

*c. Diskusi dan tanya jawab*

- Acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi bersama berupa pembentukan *Tim Kepatuhan Pajak* dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah.

**BAB III**  
**HASIL PELAKSANAAN FKP**

**III.1. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam kegiatan FKP ini dan yang saat ini sedang dihadapi oleh unit pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya PAD dari sektor ini adalah :

- *Tingkat Kesadaran WP/WR yang masih rendah*
- *Sistem Perhitungan Self Assesment oleh WP dinilai masih belum sepenuhnya berdasarkan potensi riil yang seharusnya dibayar*
- *Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam mengawasi kegiatan-kegiatan usaha pertambangan berkaitan dengan pajak MBLB dan Pajak Air Tanah*
- *Masih terbatasnya kemampuan / kompetensi aparatur dibidang perpajakan (al. belum adanya PPNS, Juru Sita, Pemeriksa Pajak dan Penilai Pajak)*
- *Upaya penagihan baru sebatas teguran*
- *Masih banyaknya potensi pajak yang belum tergali*

**III.2. Analisis**

Pembangunan ekonomi saat ini menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam rangka menunjang perekonomian kearah yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan, termasuk masalah pengelolaan pajak.

Guna mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dan hal ini sebagian sudah dilakukan di Kabupaten Tanah Laut.

Potensi pajak di Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Sebagai daerah yang cukup berkembang dengan berbagai

aktifitas ekonomi masyarakatnya tentu menjadi peluang yang cukup besar sebagai penyumbang utama PAD dari sektor ini. Namun beberapa kendala sering dihadapi dalam upaya mengoptimalkan PAD yang muncul baik dari intern unit pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut maupun dari wajib pajak.

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi dari hasil FKP ini merupakan faktor penyebab sulitnya upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah di daerah ini. Sebagai salah satu contoh *riil* yang saat ini dihadapi oleh unit pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah adalah berhubungan dengan terbatasnya kemampuan / kompetensi aparatur dibidang perpajakan, antara lain seperti belum adanya PPNS, Juru Sita, Pemeriksa Pajak dan Penilai Pajak yang mengakibatkan masih banyaknya potensi pajak yang belum tergali. Untuk itu upaya meminimalisir kendala yang ada perlu segera dilakukan melalui rencana aksi yang nyata yang melibatkan bukan hanya inter pada unit pelayanan namun juga koordinasi dengan instansi terkait juga wajib dilakukan.

### III.3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pada Forum Konsultasi Publik ini , maka Badan Pendapatan Daerah menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yang berkolaborasi dengan instansi terkait dengan membentuk *Tim Kepatuhan Pajak* , sementara untuk intern Badan Pendapatan Daerah akan melakukan *optimalisasi kinerja* berupa :

- *Melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi*
- *Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak (al. BPKP, KPP Pratama, Kejaksaan Negeri, Bank Kalsel, BPN, Pemprov. Kalsel, Notaris/PPAT)*
- *Meningkatkan Pengawasan dalam pemungutan pajak khususnya yang berpotensi besar*
- *Melakukan kegiatan sosialisasi kepada WP/WR*
- *Meningkatkan Pelayanan kepada para WP/WR dengan system pelayanan keliling / on call (al. PBB)*
- *Menyediakan layanan online untuk pembayaran PBB P2*
- *Menyediakan sarana konsultasi melalui jaringan media social ( WA,SMS,Telepon)*
- *Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyertaan diklat diklat*
- *Melakukan uji petik kebeberapa objek pajak daerah*
- *Melakukan kajian mengenai potensi pajak*

**BAB IV**  
**PENUTUP**

- Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.
- Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini diyakini dapat membantu upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. Pelaksanaan hasil rencana aksi tentunya memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- Hal yang paling penting dalam menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai standar pelayanan yang telah disepakati selain pembentukan Tim Kepatuhan Pajak yang akan melibatkan beberapa instansi terkait juga optimalisasi kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan daerah dari sektor ini menjadi hal yang utama.

## LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

---

LAMPIRAN I	: Surat Undangan
LAMPIRAN II	: Berita Acara Yang Ditandatangani
LAMPIRAN III	: Salinan Daftar Hadir
LAMPIRAN IV	: Dokumentasi Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. A. Syairani No. 36 70815 Telp (0512)21300 Pelaihari

Nomor : 970/485/ Bapenda  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Pelaihari, 13 September 2021

Kepada

Yth.

di -

**PELAIHARI**

Sehubungan akan dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) / Sosialisasi tentang Perpajakan Daerah di Kabupaten Tanah Laut, maka dimohon kehadirannya pada acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 September 2021  
Pukul : 10.00 Wita sampai selesai  
Tempat : Aula Kantor Bapenda Kab. Tanah Laut

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perkenannya diucapkan terima kasih.

~~An. Bupati Tanah Laut  
Sekretaris Daerah,~~  
  
Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640425 198703 1 012

Tembusan:

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati (sebagai laporan)



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

### BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini, Rabu 15 September 2021, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pajak Daerah dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Nara Sumber Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tanah Laut, H. Ramdani, SH, MH.

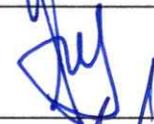
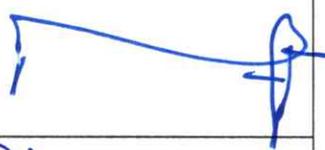
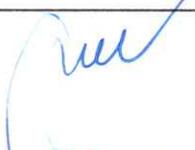
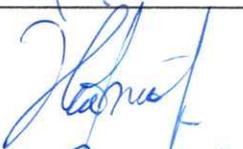
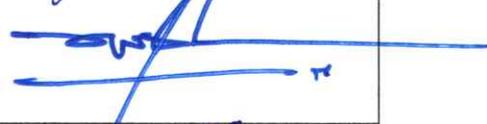
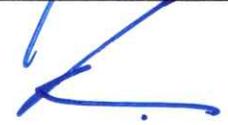
Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama dalam FKP ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

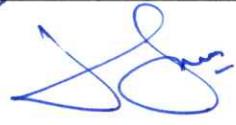
NO	Inti Permasalahan	Rekomendasi yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	<i>Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar dibidang pajak daerah dari 11 jenis pajak yang diserahkan Pemerintah Pusat sesuai dengan UU no 28 Tahun 2009 namun tak tergali secara optimal salah satu penyebabnya adalah Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam mengawasi kegiatan-kegiatan usaha pertambangan berkaitan dengan pajak MBLB dan Pajak Air Tanah</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Optimalisasi kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut</li><li>- Pembentukan Tim Kepatuhan Pajak dengan melibatkan aparatur Pemkab. Tala dengan aparat Kejaksaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Akan dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi yang akan di susun oleh unit pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut</li><li>- Perlunya koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait perihal pembentukan Tim Kepatuhan Pajak</li></ul>
2.	<i>- Dalam Pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan pemungutan pajak daerah selalu berhadapan dengan permasalahan wajib pajak yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan / kompetensi aparatur dibidang perpajakan (al. belum adanya PPNS, Juru Sita, Pemeriksa Pajak dan Penilai Pajak)</i>		

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menerima identifikasi masalah dan usulan Rekomendasi yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan serta berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

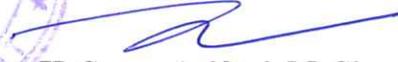
Kabupaten Tanah Laut, 15 September 2021

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Joko Wuryanto	DPM PTSP Kab. Tanah Laut	
2.	A. Syahrui	Satpol PP dan Damkar Kab. Tanah Laut	
3.	Taufikurrahman	Bagian Hukum Setda Tanah Laut	
4.	Hamid Arip	DPM PTSP Kab. Tanah Laut	
4.	Drs. H. Muhammad Badaruddin	Kabid Pajak Daerah	
5.	Fadhilah Rahman, S.KM, MPH	Kabid PBB dan BPHTB	
6.	Indra Wardhana, SSTP	Kabid Pendapatan Lain Lain, Retda dan Pelaporan	
7.	H. Fahruji, SE.Ak, MM	Kasubbid. Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah	
8.	Hasmi Noorbana, S.Kom	Kasubbid. Penagihan Pajak Daerah	
9.	M. Izzuddin, S.AP	Kasubbid. Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	
10.	Rija Nupari, S.ST	Kasubbid Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB	
11.	Giri Aristiadie, S.Pd, MM	Kasubbid. Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan PBB dan BPHTB	
12.	Aspi Setia Rahman, S.Pt	Kasubbid. Penagihan PBB dan BPHTB	

13.	Irlin Purnamawati, A.Md	Kasubbid Buklap	
14.	Aberiansyah, S.AP	Kasubbid Retda	
15.	Novian Iskandar Z, S.Kom	Kasubbid. Pendapatan Lain Lain dan Perencanaan Pendapatan	



Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tanah Laut

  
**Drs. H. Surya Arifani, M. Si**  
NIP.19650627 199003 1 011



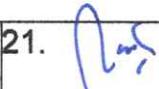
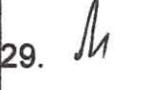
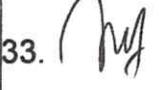
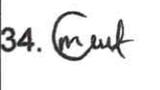
# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Syairani, Pelaihari

## DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu.  
Tanggal : 15 September 2021.  
Waktu : 10.00 WITA s/d Selesai.  
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA Kab. Tanah Laut.  
Acara : Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi Tentang Perpajakan Daerah Di Kabupaten Tanah Laut.

NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN
1.	Ramadhan	Kepala Tala	1.
2.	Suma A	Ka. Bopud	2.
3.	Joko Wuryanto	Ka. DPMPESP	3.
4.	Hamid Arip	DPMPESP	4.
5.	M. BAKRUDIN	Kabid PD	5.
6.	Fathuloh Rahman	Ka. id PBB & BPHTB	6.
7.	Riza Nupari	Kabid. PP PBB BPHTB	7.
8.	Aspi Setia Rahman	Kabid. P PBB BPHTB	8.
9.	GIRI ARISTIADIE	Ks bid P2K PBB BPHTB	9.
10.	Indra Warkana	Kabid PLROD	10.
11.	Fahrudin	Kasubid. PPXPD Bapenda	11.
12.	Taufikurrahman	Kasubid. PPHT	12.
13.	A. Syahrudin	Ka. B. B. B.	13.
14.	Hasmi - N	Ka. B. B.	14.
15.	M. BAKRUDIN	Ka. B. B.	15.
16.	MAYARINA	STAF	16.
17.	NOOR HAMIDAH N	STAF	17.
18.	Sni Regni		18.
19.	Muhammad	Kasubid. Perenc & ka	19.
20.	Riana Dwi Astubi	PTT	20.

21.	Nani Muliana	Kasubag Umpeg	21.	
22.	Aberiansyah	Kanbid Retor	22.	
23.	NOVIAN Laksana	Kasubid PII Dep	23.	
24.			24.	
25.	M. JAZULI	STAF	25.	
26.			26.	
27.	Surya. Nurhiddin	STAF	27.	
28.	Elimar Billy Shombing	STAF	28.	
29.	Syamsul Mawati	STAF	29.	
30.	Abdul Wahid	STAF	30.	
31.	Mulyono.	STAF	31.	
32.	Gapuri	STAF	32.	
33.	ARIF RAKMAN		33.	
34.	Maulida Adella	STAF	34.	
35.	M. Iwan Syam		35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	

Pelaihari, 15 September 2021  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

  
**Drs. H. SURYA ARIFANI, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19650627 199003 1 011**

## DOKUMENTASI KEGIATAN





